

BPK dan BPKP Bekali Para Pejabat OKI



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membekali penjabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI, dalam hal pengelolaan keuangan.

Secara bergantian kepala perwakilan BPKP dan BPK perwakilan Sumsel, memberi materi pelaporan LKPDⁱ berbasis akrual kepada para penjabat Pemkab OKI di Ruang Rapat Bende Seguguk I. Kamis, 5 Maret.

Wakil Bupati OKI, H. M. Rifa'i, SE yang menerima rombongan mengatakan Pemkab OKI akan terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan yang mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku. Wakil bupati juga mohon bimbingan dari BPK dan BPKP dalam penerapan standar akuntansi ini.

“Kami terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Seiring dengan diberlakukannya aturan pengelolaan keuangan berbasis akrualⁱⁱ, kami terus mohon bimbingan dari BPKP Sumsel dalam menerapkan standar akuntansi ini” ungkap Rifa'i.

Rifa'i juga mengucapkan terimakasih atas bimbingan BPKP Sumsel Kabupaten OKI mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)ⁱⁱⁱ untuk pelaporan keuangan daerah.

Kepala Perwakilan BPK Sumsel I Gede Kastawa mengemukakan, LKPD Berbasis Akrual merupakan audit standar internasional. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010, LKPD berbasis akrual ini wajib dilaksanakan mulai tahun 2015 ini.

“Standar akuntansi yang digunakan selama ini yakni berbasis kas, dinilai kurang tepat dan masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, Maka kedepannya dengan adanya program Akrual basis bisa diterapkan segera mungkin bagi akuntansi Pemerintah Daerah” ungkapnya .

Dia mengatakan, BPK dan BPKP siap mendampingi Pemda dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual ini.

“Jika pemerintahan daerah mengalami kesulitan membuat LKPD, maka dapat berkonsultasi dengan BPKP, sehingga tidak ada kendala dalam penyampaian laporan keuangan” jelas I Gede Kastawa.

Sumber berita:

1. Berita Pagi, BPK dan BPKP Bekali Para Pejabat OKI, Kamis, 5 Maret 2015.

ⁱ LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

ⁱⁱ Akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas.

ⁱⁱⁱ Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.